BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Menurut Mulyasa (2006: 4), kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggaran khususnya guru dan kepala sekolah. Sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, karenanya sejak saat itu pula pemerintah menyusun kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa dan seluruh tanah air Indonesia.

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat (Nana Syaodih, 2005: 150). Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi

pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan, dan tantangan perkembangan masyarakat

Jadi kurikulum merupakan seperangkat aturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Kurikulum

Tujuan adalah arah atau sasaran yang akan dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Setiap kegiatan semestinya mempunyai tujuan, karena tujuan menuntun kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran yang jelas tentang hasil akhir dari suatu kegiatan.

Menurut Asep Herry Hermawan (2005: 116) tujuan kurikulum adalah :

1) memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah dicapai.
2) memegang peranan sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar.
3) kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan kemampuan serta sikap yang ingin dikembangkan.

c. Komponen Kurikulum

Menurut Suciati, dkk (2005: 4) komponen kurikulum yaitu sebagai berikut:

1) Komponen tujuan

Tujuan yang ditetapkan harus mengacu pada prinsip-prinsip atau kriteria tertentu yaitu kriteria substantif yang terdiri dari kebutuhan dasar anak,

kebutuhan sosial masyarakat, ilmu pengetahuan dan filsafat. Kriteria lainnya adalah kriteria prosedur mencakup keterwakilan *(representif)*, kejelasan, terpertahankan, konsistensi, dan fleksibilitas.

Tujuan yang diterapkan harus disusun dan dinyatakan secara jelas. Pernyataan yang tidak jelas, yang dipenuhi kata-kata atau istilah yang rancu dan kabur akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada tingkat penyusunan, pengelola sekolah, dan pada tingkat pelaksana kurikulum termasuk guru. Untuk menghindarinya diperlukan definisi operasional dan persamaan arti, istilah, konsep-konsep yang dimiliki oleh orang-orang yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum atau memiliki persamaan arah/tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

2) Komponen Isi

Isi kurikulum yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga nantinya yang diperoleh siswa adalah sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan isi kurikulum diperlukan keahlian seseorang dalam suatu bidang atau mata pelajaran, sehingga dengan keahlian yang dimiliki itulah dapat mengkaji struktur bahan yang menjadi isi kurikulum. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan guru yang sangat berkompeten.

3) Komponen Metode dan Proses Pembelajaran

Metode dan proses pembelajaran adalah cara siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Metode berkenaan dengan proses pencapaian tujuan, proses berkaitan dengan bagaimana pengalaman belajar atau isi kurikulum diorganisasikan. Setiap bentuk organisasi yang digunakan membawa dampak kepada proses untuk memperoleh pengalaman yang dilaksanakan. Untuk kepentingan ini diperlukan kriteria pola organisasi kurikulum yang efektif.

4) Komponen Evaluasi/Penilaian

Evaluasi yaitu cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat dicapai/tidak. Evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Melalui evaluasi akan diperoleh balikan tentang pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Dengan balikan yang diperoleh dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara terus menerus. Untuk itu terlebih dahulu perlu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi dengan menggunakan acuan dan kriteria yang jelas pula. Perlu ditetapkan dua sasaran utama dalam evaluasi :

a) Evaluasi terhadap hasil (produk) kurikulum yaitu evaluasi yang menilai sampai sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan/hasil yang diharapkan.

b) Evaluasi terhadap proses kurikulum yaitu evaluasi yang menilai apakah proses itu berjalan secara optimal sehingga memungkinkan tercapainya tujuan.

d. Fungsi Kurikulum Bagi Guru

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru bertugas dan bertanggung jawabmelaksanakan dan mengembangkan kurikulum di kelas. Dengan kurikulum guru dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

e. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang ada dalam studi kurikulum, yaitu sebagai alat untuk membantu guru melakukan tugasnya menyampaikan pembelajaran yang menarik minat siswa. Kegiatan pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan untuk merespons perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan sosial di luar sistem pendidikan, memenuhi kebutuhan siswa, dan merespon kemajuan-kemajuan dalam pendidikan.

Masalah yang ada dalam proses pengembangan kurikulum biasanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana memilih materi yang diajarkan, apa yang harus dilakukan bila ada pandangan yang bertolak belakang dengan pengembangan dan bagaimana menerapkan kurikulum secara meyakinkan.

Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Ada empat bagian penting dalam kurikulum meliputi : tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat bagian/komponen kurikulum ini salaing berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai perilaku yang diinginkan/dicita-citakan oleh tujuan pendidikan nasional. Kaitan antara empat komponen tersebut adalah sebagai barikut:

1) Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam memilih isi/materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan serta bentuk dan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum.
2) Hierarki perumusan tujuan kurikulum dimulai dari tujuan umum pendidikan, kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.
3) Materi kurikulum menurut Saylor dan Alexander adalah fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk konsep, generalisasi, prinsip, dan pemecahan masalah.
4) Strategi pembelajaran berkaitan dengan bagaimana menyampaikan isi/materi kurikulum agar tujuan tercapai dan komponen evaluasi kurikulum adalah untuk menilai apakah tujuan kurikulum telah tercapai. Hasil dari evaluasi kurikulum adalah berupa umpan balik apakah kurikulum ini akan direvisi atau tidak (http://massofa.wordpress.com/2009/11/02/pengembangan-kurikulum-dan-pembelajaran-pkn/).

f. Cara Mengembangkan Kurikulum

1) Menentukan Tujuan

Rumusan tujuan dibuat berdasarkan analisia terhadap berbagai tuntutan, kebutuhan dan harapan. Tujuan dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan masyarakat dan siswa.

2) Menentukan Isi

Isi kurikulum merupakan materi yang akan diberikan kepada siswa selama mengikuti proses pendidikan/proses pembelajaran. Materi ini dapat berupa mata pelajaran untuk masalah yang berhubungan dengan kehidupan yang perlu dipelajari untuk mencapai tujuan.

3) Merumuskan Kegiatan Pembelajaran

Hal ini mencakup penentuan metode dan keseluruhan proses pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

4) Mengadakan Evaluasi

Evaluasi sangat tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Evaluasi sangat penting dilakukan agar memperoleh balikan/*feedback* guna mengadakan perbaikan. Evaluasi terus diadakan baik terhadap hasil maupun proses belajar.

g. Pembaharuan Kurikulum

Banyak faktor yang mendorong pembaharuan kurikulum yaitu :

1) Pengembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi masyararakat.
2) Didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama negara (Nana Syaodih, 2005: 103).

Langkah-langkah pembaharuan menurut Nana Sudjana (2005: 148)adalah sebagai berikut :

1) Mengenal dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan kurikulum.
2) Mobilisasi suatu perubahan kurikulum.
3) Studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat
4) Studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik.

5) Formulasi tujuan pendidikan
6) Menetapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran
7) Mengorganisasikan pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran.
8) Pelaksanaan kurikulum .
9) Evaluasi dan revisi kurikulum.

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

a. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan sektor pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya jalur pendidikan sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah dan praktisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaharui dalam bidang kurikulum di sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Dengan perubahan ini, pemerintahan berharap mampu meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Joko Susilo (2007: 94-95), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan merupakan hasil penegasan dari atau sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Ini merupakan sebuah konsep yang indah karena memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah yang berkembang. Dengan ini seluruh potensi setempat diharapkan dapat didayagunakan demi pengembangan setempat.

Penekanan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada aspek kompetensi dan peluang menghadapi dunia kerja yang merupakan perpaduan

dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan pekerjaan tertentu. Dengan demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari dengan kemampuan yang diperlukan di dunia kerja. Untuk hal tersebut kurikulum menuntut kerjasamanya dengan baik antara lembaga pendidikan dengan lembaga tenaga kerja, terutama dalam hal ini analisis kompeensi yang perlu diajarkan pada peserta didik di sekolah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat diartikan sebagai konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kamampuan keterampilan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dunia kerja dan mampu melakukan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu *(competency)* atau cakap, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa. 2005: 39).

Jadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah konsep kurikulum tertuju pada suatu pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, kemampuan, pandangan sikap, nilai, dan minat peserta didik sehingga peserta didik mampu melakukan kegiatan yang berbentuk keterampilan dan juga kompetensi-kompetensi yang lainnya.

b. Konsep Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

c. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Secara umum tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong

sekolah untuk melaksanakan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus menurut Mulyasa (2006: 22) tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebagai barikut :

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

d. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Menurut Masnur Muslich (2010: 12-16), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdapat empat komponen, yaitu:

1) Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

a) Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

b) Tujuan Pendidikan Menengah adalah meningkatkan kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

c) Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

2) Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut :

a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.

b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

c) Kelompok mata pelajaran pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

d) Kelompok mata pelajaran estetika.

e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

3) Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

4) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berdasarkan silabus inilah guru bisa mengembangkannya menjadi Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar bagi siswanya.

e. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bisa diketahui dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Beberapa karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis, dan profesional, serta team-kerja yang kompak dan transparan (Mulyasa. 2006: 190).

f. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pengembangan kurikulum untuk setiap satuan pendidikan, yang dilakukan pada tahap ini antara lain, yaitu:

1) Menganalisis dan mengembangkan standar kompetensi lulusan, dan Standar Isi.
2) Merumuskan visi dan misi, serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
3) Berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, visi, dan misi, serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas selanjutnya dikembangkan mata pelajaran yang akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut.
4) Mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan (guru dan non guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dengan berpedoman pada standar tenaga kependidikan yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan.
5) Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi kemudahan belajar, sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa. 2006: 149)

g. Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Menurut permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
   Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.
2) Beragam dan Terpadu
   Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristis peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.
3) Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
   Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti, dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4) Relevansi dengan Kebutuhan
   Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakehoders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja.
5) Menyeluruh dan Berkesinambungan
   Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
6) Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

7) Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal.

h. Landasan Pengembangan Kurikulum

Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Secara umum terdapat tuas aspek pokok yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut yaitu landasan fisolofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis.

Landasan fisolofis berkaitan dengan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini menjadi landasan utama bagi landasan lainnya. Perumusan tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan fisiolofis. Pandangan fisolofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan bidang studi, dan tujuan instruksional.

Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi/teori belajar (*psychology/theory of learning*) dan psikologi perkembangan (*developmental psychology*). Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana kurikulum ini disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus

mempelajarinya. Jadi dengan kata lain, psikologi belajar berkenaan dengan penentuan strategi kurikulum, sedangkan psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan taraf perkembangan siswa tersebut.

Landasan sosiologi dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu mengandung nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya yang menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum. Ilmu pengetahuan dan teknologi sesbagai produk kebudayaan diperlukan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya menyelaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia iptek (http://massofa.wordpress.com/2009/11/02/ pengembangan-kurikulum-dan-pembelajaran-pkn/).

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa (2006: 213), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik (Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses)

Menurut Masnur Muslich (2010: 41-46), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Namun sebelum Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan guru agar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun bisa efektif dan efisien yaitu sebagai berikut :

1) Melakukan pemetaan kompetensi dasar per unit.

Pemetaan kompetensi dasar per unit adalah penataan semua kompetensi dasar yang tertuang dalam silabus mata pelajaran ke dalam unit-unit pembelajaran. Pengetahuan terhadap porsi waktu setiap unit akan memudahkan

guru dalam pengembangan materi pembelajaran ketika menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Hal yang harus diperhatikan guru dalam pemetaan kompetensi dasar per unit adalah sebagai berikut :

a) Pengurutan kompetensi dasar sesuai dengan prinsip keilmuan, pendidikan (pengajaran), dan kadar kesulitan/kedalaman.
b) Penyatuan kompetensi dasar yang sejenis.
c) Pemberian jumlah waktu/jam pelajaran setiap unit dengan melihat hasil pengembangan silabus.
d) Pembagian jumlah waktu/jam pelajaran yang tersedia (dalam satu tahun atau satu semester) ke semua unit secara proporsional.

2) Melakukan analisis alokasi waktu.

Analisis alokasi waktu adalah pelacakan jumlah minggu dalam semester/tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pelajaran tertentu.

Hal yang perlu diperhatikan guru dalam analisis alokasi waktu adalah sebagai berikut :

a) Penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester/tahun pelajaran dengan melihat kalender umum.
b) Penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester/tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan.

c) Penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester/tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan.

d) Penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya.

e) Pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian (kalau ada), ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.

f) Pembagian jumlah waktu/jam pelajaran efektif (dalam satu tahun atau satu semester) ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan.

3) Menyusun program tahunan dan/atau program semester.

Program tahunan dan program semester adalah rencana umum pembelajaran mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam satu tahun/semester. Penyusunan program tahunan dan program semester ini berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang ditetapkan sebelumnya dan hasil pemetaan kompetensi dasar per unit.

Hal yang patut dilakukan guru dalam penyusunan program tahunan dan program semester adalah sebagai berikut:

a) Mendaftar kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan hasil pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun.

b) Mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun.

c) Menentukan materi pembelajaran pokok pada setiap komptensi dasar, yang didapatkan dari pengembangan silabus yang telah disusun atau dari kreativitas guru.

d) Membagi habis jumlah jam pelajaran efektif (dalam satu tahun atau satu semester) ke semua unit pembelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan pengalokasian waktu yang terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun.

4) Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Langkah yang patut dilakukan guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

a) Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran.
b) Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit tersebut.
c) Menentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut.
d) Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.
e) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.
f) Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
g) Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan pembelajaran.
h) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
i) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua) jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih

dari satu pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisa didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi pembelajaran.

j) Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan.

k) Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Jadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran yang diterapkan guru di dalam pembelajaran di kelas. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran.

b. Fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaram

Menurut Mulyasa (2006: 217-218), terdapat dua fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

1) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang.

2) Fungsi Pelaksanaan

Dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang

aktual. Rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan.

c. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa, (2006: 151), berdasarkan standar kompetensi dan standar isi dalam silabus yang telah diidentifikasi dan diurutkan sesuai dengan tingkat pencapaiannya pada setiap bidang studi, selanjutnya dikembangkan program-program pembelajaran, menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau persiapan mengajar.

Pelaksanaan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang akan menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan dan menentukan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam hal ini merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan Penilaian Berbasis Kelas. Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan potensi peserta didik, materi standar berfungsi memberi makna terhadap

kompetensi dasar, indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi. Penilaian berbasis kelas berfungsi mengukur pembentukan kompetensi, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi dasar belum berbentuk atau belum tercapai (Mulyasa. 2009: 153-155).

d. Prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus memperhatikan perhatian dan karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan kajian.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menyukseskan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sebagai berikut :

1) Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas, makin konkrit kompetensinya makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut.
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus sederhana dan fleksibel,serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik.

3) Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan.
4) Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
5) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (*team teaching*) atau dilaksanakan di luar kelas, agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran yang lain (Mulyasa 2006: 218-219).

e. Cara Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Cara Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam garis besarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1) Mengisi kolom identitas
2) Menentukanalokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan
3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun.
4) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan.
5) Mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok/pembelajaran yang terdapat dalam silabus.
6) Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan
7) Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir.
8) Menentukan sumber belajar yang digunakan
9) Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran (Mulyasa, 2006: 222-223).

B. Tnjauan Umum tentang Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut National Council of Social studies (NCSS) Amerika serikat yang di kutip oleh Cholisin (2000: 6)

> Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses yang meliputi semua pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warga Negara dalam peranannya di masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sebagai sekedar bidang studi saja seperti halnya mata pelajaran yang lain. Tetapi mata Pendidikan Kerwarganegaraan mengambil dari pengaruh positif dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan generasi muda dibantu untuk memahamin cita-cita nasional, hal-hal yang baik diakui oleh umum, proses pemerintahan sendiri dan dibantu untuk memahami arti kemerdekaan untuk mereka dan untuk semua manusia dan untuk individu dan kelompok, dalam bidang kepercayaan, perdagangan, pemilu dan dalam tingkah laku sehari-hari. Mereka juga dibantu untuk memahami bermacam-macam hak kemerdekaan warga negarayang dijamin dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya, dan tanggung jawab atas apa yang telah dicapainya.

Menurut Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan *Civics* di Tawangmangu, Surakarta 1972, Pendidikan Kewarganegaraan yaitu suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria, ukuran, ketemtuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 7).

Menurut Nu’man Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semua itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar

berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 7).

Menurut Cholisin (2000: 9), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga Negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi maupun strategi pengajarannya.

Jadi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Materi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan *(knowledge),* keterampilan *(skill),* dan nilai *(values).*sejalan dengan ide pokok mata pelajaran Penddikan Kewarganegaraan yaitu membantu terwujudnya warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sesuai dengan konsep dan prinsip pendidikan Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang

baik tersebut dapat membantu terwujudnya masyarakat demokratis konstitusional.

Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum *(rule of law)* dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik yang mencakup percaya diri, komitmen penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, tolerasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, perlindungan terhadap minoritas, dan sebagainya. Dalam kaitanyan dengan nilai keterampilan, keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk keperluan pengembangan silabus berbasis kemampuan dasar, karakterstik suatu mata pelajaran perlu diidentifikasi. Struktur keilmuan suatu mata pelajaran menyangkut dimensi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi atas struktur keilmuan mata pelajaran tersebut. Hasil identifikasi karakteristik mata pelajaran tersebut bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran.

Menurut Branson dalam CCE (center for Civics Education) pada tahun 1994 dalam national standardz of civics and government, ketiga komponen

pokok Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge, civic skills,* dan *civic dispositions* (Cholisin, 2008: 2-6).

a. Pengetahuan Kewarganegaraan

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban/peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Hal ini dapat dinyatakan aspek-aspek tersebut pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis.

b. Ketrampilan Kewarganegaraan

Ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan ketrampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (ketrampilan intelektual) dan

participation skills (keterampilan partisipasi). Ketrampilan intelektiul yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah ketrampilan berpikir kritis. Ketrampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Ketrampilan intelektual tampak ada upaya diakomodasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan (2004) yang secara eksplisit dinyatakan dalam praktik Pembelajaran Kewarganegaraan diharuskan adanya pengembangan dan penerapan cara berpikir kritis, rasional, dan kreatif untuk mendukung kompetensi dasar. Juga dapat ditemui pada indikator, meskipun belum memadai bahkan masih ada kemampuan "menyebutkan" sebagai sesuatu kemampuan yang sangat rendah dan tidak termasuk dalam kategori berpikir kritis masih digunakan.

Tabel 1. Komponen Ketrampilan Kewarganegaraan

KETRAMPILAN INTELEKTUAL	KETRAMPILAN PARTISIPASI
1. **Mengidentifikasikan,** (menandai/menunjukan) dibedakan menjadi keterampilan: Membedakan Mengelompokkan/mengklasifikasi Menentukan bahwa sesuatu itu asli. 2. **Menggambarkan**, (memberikan uraian/ ilustrasi),	1. **Berinteraksi** (termasuk berkomunikasi tentunya) terhadap obek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam keterampilan ini, antara lain: Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun Menjelaskan artikulasi kepentingan

misalnya tentang: Proses, Lembaga, Fungsi, Alat, Tujuan, Kualitas. 3. **Menjelaskan**, (mengklasifikasi/menafsirkan), misalnya tentang: Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa Makna dan pentingnya peristiwa atau ide, Alasan bertindak 4. **Menganalisis**, Misalnya tentang kemampuan menguraikan: Unsur-unsur komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi; Konsekuensi dari ide proses pollitik, institusi-institusi Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dengan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik. 5. **Mengevaluasi** pendapat/posisi: Menggunakan kriteria atau standart untuk membuat keputusan tentang: Kekuatan dan kelemahan isu/pendapat	Membangun koalisi, negosiasi, kompromi Mengelola konflik secara damai Mencari konsensus 2. **Memantau/memonitor** masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, yang termasuk keerampilan ini antara lain: Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV dan lain-lainuntuk mengetahui persoalan-persoalan publik. Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelopok kepentingan pejabat pemeritah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi. 3. **Mempengaruhi proses politik**, pemerintah baik secara formal maupn informal, yang termasuk keterampilan ini antara lain: Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanya, pemilu, dengar pendapat,di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobi, peradilan Memberikan suara dalam

Menciptakan pendapat baru 6. **Mengambil pendapat/posisi**: Dari hasil seleksi berbagai posisi Membuat pilihan baru 7. **Mempertahankan pendapat/posisi**: Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan/diambil/ dibela Merespon posisi yang tidak disepakati	suatu pemilihan, Membuat petisi Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian di hadapan lembaga publik. Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain Meminta atau menyediakan diriuntuk menduduki jabatan tertentu.

Sumber : Diolah dari Center For Civic Education (1994). Nasional Standart for Civics and Government, p.p 1-5;127-135

c. Karakter Kewarganegaraan

Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri, dan kepentingan umum. Karakter kewarganegaraan didalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan (2004) belum dikembangkan secara baik dan lengkap. Dikatakan demikian, karena karakter kewarganegaraan belum terumuskan pada setiap kompetensi dasar, hasil belajar maupun indikator. Begitu pula meskipun telah isentuh karakter publik (misalnya : mematuhi perundang-undangan nasional, mengapresiasi dinamika politik Indonesia) namun karakter publik yang kritis terhadap undang-undang maupun terhadap sistem politik maupun rejim tampak kurang diperhatikan padahal hal ini sangat penting

dalam masyarakat demokratis. Supaya segala produk undang-undang sejalan dengan aspirasi dan di bawah control masyarakat. Sehingga misalnya dalam praktik pembelajaran kewarganegaraan perlu dimasukkan karakter publik yang berupa “Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat”.

Karakter privat dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi juga nasibnya sama dengan karakter publik. Misalnya, karakter privat ini dapat dipahami dengan rumusan “membiasakan diri mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggung jawab”, “membiasakan diri melaksanakan budidaya demokrasi di lingkungan masyarakat”. Kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam kondisi transisional dan sangat dinamis, dimana antara fakta dan isu; benar dan salah cenderung berkembang menjadi kabur (*absurd*) atau “dikaburkan”. Ciri-ciri watak/karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi :

1) Menjadi masyarakat yang *independen* (mandiri)

Karakter ini merupakan kepatuhan secara sukarela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, yang termasuk karakter ini antara lain :

a) Mengurus diri sendiri
b) Member nafkah/menopang keluarga

c) Merawat, mengurus dan mendidik anak
d) Mengikuti informasi tentang isue-isue publik
e) Memberikan suara (*voting*)
f) Membayar pajak
g) Menjadi saksi di pengadilan
h) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
i) Melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/masing-masing.

3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, yang termasuk karakter ini antara lain :

a) Mendengarkan pendapat orang lain
b) Berperilaku santun (bersikap sopan)
c) Menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara
d) Memenuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat

4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif

Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Hal ini juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat-sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik) diantaranya :

a) Keberadaan (civilly), yang termasuk sifat ini antara lain : menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham, mendengarkan pandangan orang lain, dan menghindari argument yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal.
b) Menghormati hak-hak orang lain, yang termasuk sifat ini antara lain : menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukumnya, dan menghormati hak orang lain untuk memegang dan mengajukan gagasan yang bermacam-macam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandanga-pandangan mereka.
c) Menghormati hukum, yang termasuk sifat ini antara lain : berkemauan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinya, dan berkemauan melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak arif dan adil.
d) Jujur : berkemauan untuk memelihara dan mengekpresikan kebenaran.
e) Berpikir terbuka : yaiu mempertimbangkan pandangan orang lain.
f) Berpikir kritis : yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
g) Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi : yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral.
h) Ulet/tidak mudah putus asa : yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
i) Berpikiran kewarganegaraan : yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan-urusan publik/kemasyarakatan.
j) Keharuan/memiliki perasaan kasihan : yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung.
k) Patriotism : memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional
l) Keteguhanhati : kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.
m) Toleran terhadap ketidakpastian : yaitu kemampuan untuk menerima ketidak pastian yang muncul, karena ketidak cukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang komplek atau tentang ketegangan antara nilai-nilai fundamental dengan prinsip-prinsip.

5) Mengembangkan fungsi demokrasi konsttusional yang sehat

Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana, yang termasuk dalam karater ini antara lain :

a) Sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik
b) Melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional
c) Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terhadap kekurangannya.

Jadi karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan mencakup komponen pokok yang terdiri dari *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civiv depositions* (karakter kewarganegaraan). Pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem poitik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerja sama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills*

(keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Karakter kewarganegaraan *(civic dispositions)* merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik warga negara yang baik, yakni sebagai berikut :

a. Peka terhadap informasi baru yang dijadikan pengetahuan dalam kehidupannya.
b. Warga negara yang berketerampilan: peka dalam menyerap informasi, mengorganisasi dan menggunakan informasi, dan membina pola hubungan interpersonal dan partisipasi sosial.
c. Warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, yang diisyaratkan dalam membangun suatu tatan masyarakat yang demokratis dan beradab, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis yang meliputi:

1) Rasa hormat dan tanggungjawab terhadap sesama warga terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebagai warga negara yang demokrat, seorang warga negara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antara etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut.
2) Bersikap kritis terhadap keyakinan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis yang harus ditujukan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggungjawab terhadap apa yang dikritik.
3) Membuka diskusi dan dialog yakni perbedaan dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multietnik. Untuk meminimalisasi konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga ngara yang demokrat.

4) Bersikap terbuka yang merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.
5) Rasional yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan warga negara, baik persoalan politik, sosial, budaya, dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan keputusan-keputusan yang rasional.
6) Adil adalah menempatkan sesuatu secara proporsional. Tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil. Dengan semangat keadilan , maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang didiktekan tetapi ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah ditur tetapi diperoleh.
7) Jujur yaitu memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan suatu yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan diri keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan di segala sektor, baik politik, sosial, dan sebagainya (http://Lpmpjogja.diknas.go.id).

Menurut Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum,

ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaran menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 217), agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4) Berinteraksi secara langsung dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga Negara yang baik, yang memiliki karakter antara lain memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, dan berpartisipasi terhadap pembangunan.

4. Kompetensi dari Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut E. Kus Eddy Sartono (2000: 12), kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah dimilikinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam

berhubungan dengan negara serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika, dan budaya.

Kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik setelah menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 4, bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Standar kompetensi lulusan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:

a. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional dan tindakan anti korupsi.
c. Menganalisis pola-pola pada partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan Hak Asasi Manusia baik di Indonesia maupun di luar negeri.
d. Menganalisis peran dan hak warga Negara dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan Negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia.
f. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional
g. Mengevalusi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

h. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional dan kerjasama global lainnya.
i. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamsh internasional (PP No 19 Tahun 2005).

Standar Kompetensi kelompok Mata Pelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan, dan kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, di mana untuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Jadi kompetensi yang harus dimiliki melalui Pendidikan Kewarganegaraan adalah warganegara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni, namun tidak kehilangan jati diri (tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya).

5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaanegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diatur di dalam lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

b. Norma, hukum, dan peraturan meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
e. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
f. Kekuasan dan Politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

C. Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa (2006: 255) pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Tugas guru

yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dari peserta didik.

Pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Isi merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Jadi pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/pembelajaran/ pemelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pembelajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum.

2. Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa (2006: 255-258) pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup tiga hal, yaitu:

a. Pre Tes (tes awal)

Pre tes memiliki banyak kegunaan dalam menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, karena itu pre tes memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembelajaran.

Fungsi pre tes antara lain:

1) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka kerjakan.
2) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan.
3) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
4) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar yang mana yang telah dikuasai peserta didik, serta kompetensi dasar mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.

b. Pembentukan Kompetensi

Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembentukkan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya.

Kualitas pembentukkan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Dilihat dari segi proses, pembentukkan kompetensi dapat dikatakan

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat aktif, baik mental, fisik maupun sosial dalam proses pembentukkan kompetensi dasar. Kemudian dari segi hasil, proses pembentukkan kompetensi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) sesuai dengan kompetensi dasar.

Proses pembentukkan kompetensi dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan pembangunan.

c. Post Tes

Pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post tes yang memiliki banyak kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran dan pembentukkan kompetensi.

Fungsi post tes antara lain:

1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didk terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok.
2) Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasai.

3) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar yang dihadapi.
4) Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan pembentukkan kompetensi yang telah dilaksanakan, baik terhadap perncanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Menurut Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Guru dalam kegiatan pendahuluan, antara lain:

1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari
3) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai
4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

1) Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk membuat rencana untuk membangun pengetahuan dasar siswa. Guru dalam kegiatan eksplorasi,:

a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber.
b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain.
c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.
d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
e) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

2) Elaborasi

Elaborasi adalah kegiatan inti pembelajaran. Guru dalam kegiatan elaborasi :

a) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.
b) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.
c) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
d) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.
e) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar.
f) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok.
g) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok.
h) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.
i) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

3) Konfirmasi

Konfirmasi merupakan tahap akhir dari pembelajaran. Pada bagian ini guru memberikan *feedback* terhadap para peserta didik. Kegiatan konfirmasi, guru:

a) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.
b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber.
c) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.
d) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar, membantu menyelesaikan masalah, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh dan memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

c. Kegiatan Penutup

Guru dalam kegiatan penutup:

1) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
3) umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.
5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Jadi kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan penutup.

D. Kerangka Pikir

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan merupakan kegiatan paling awal dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya telah disusun oleh guru mata

pelajaran. Kemudian evaluasi di mana siswa dinilai sesuai dengan standar nasional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikimotorik.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian berbasis kelas.

Pelaksanaan pembelajaran bedasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Terkait dengan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran maupun pelaksanaannya di dalam pembelajaran, diduga para guru masih ada yang mengalami kesulitan.

Untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik perlu adanya peningkatan/pengembangan komponen-komponen tersebut, sehingga penting sekali untuk dilakukan penelitian terhadap hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema kerangka-kerangka berpikir berikut :

BAGAN

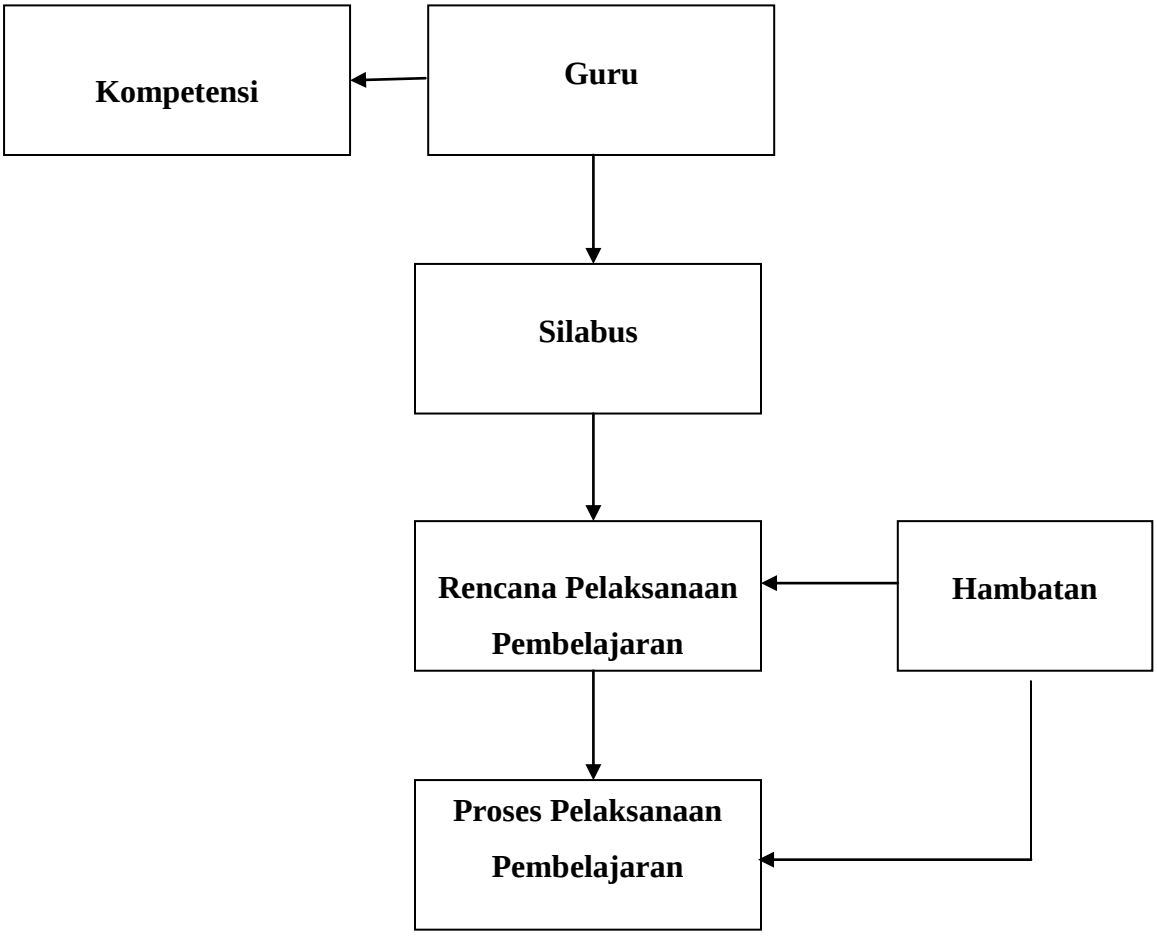

Gammbar 1. Kerangka Pikir

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?